

ISBN : 978-979-562-032-7

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

dalam Rangka Dies Natalis ke-51
Universitas Negeri Yogyakarta
diselenggarakan di UNY, 20-21 April 2015



Tema
*Penelitian dan PPM
untuk Mewujudkan Insan Unggul*

Buku 1.

Bidang Pendidikan

Penyunting:

Prof. Dr. Suharti

Prof. Dr. Endang Nurhayati

Dr. Enny Zubaidah

Dr. Tien Aminatun

Dr. Giri Wiyono

Sri Harti Widyastuti, M.Hum.

Ary Kristiyani, M.Hum.

Zulfi Hendri, M.Sn.

Venny Indria Ekowati, M.Litt.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua LPPM UNY	i
Kata Pengantar Ketua Panitia Seminar Nasional.....	ii
Daftar Isi	iii

BIDANG PENDIDIKAN

1. Pengembangan <i>Subject Specific Pedagogy</i> Tematik untuk Mengembangkan Karakter Siswa Sekolah Dasar Insih Wilujeng, Muhsinatun Siasah Masruri, dan Muhammad Nur Wangid.....	1
2. Strategi Peningkatkan Kemampuan <i>Teacherpreneur</i> Melalui Model Partnership Guru Produktif SMK dengan DUDI Endang Mulyatiningsih, Sugiyono, dan Sutriyati Purwanti	21
3. Latihan Imageri untuk Meningkatkan Keterampilan Teknik <i>Lay-up Shoot</i> Bola Basket Dimiyati, Sri Winarni, Tri Ani Astuti, dkk.	40
4. Tri Sakti sebagai Sarana Pembentuk <i>Entrepreneurship Building</i> (Kajian <i>Best Practice Guru</i>) Dwi Ermavianti dan Wahyu Sulistyorini	55
5. Implementasi Model Pendidikan Wirausaha Berbasis <i>Hypnometacreativepreneur</i> untuk Menghasilkan Wirausaha yang Memiliki Keyakinan, Mindset, Spiritual, dan Kreativitas Positif Kompetitif Subiyono, Sutiyono, dan Moerdiyanto	73
6. Pembelajaran Praktik Pemesinan Berbasis <i>Collaborative Skill</i> sebagai Upaya Peningkatan Mutu Lulusan Pendidikan Vokasi Dwi Rahdiyanto, Putut Hargiyarto, Asnawi	93
7. Identifikasi Latihan Visualisasi Atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014 Ch. Fajar Sriwahyuniati dan Ratna Budiarti	108
8. Kelayakan <i>Software</i> ANBUSO Sebagai Alat Analisis Butir Soal bagi Guru Ali Muhson, Barkah Lestari, Supriyanto, dan Kiromim Baroroh	123
9. Pengembangan Media Komik IPA Terpadu Berbasis Pendidikan Karakter untuk Peserta Didik SMP AK Prodjosantoso, Jumadi, dan Bambang Subali	139
10. Standarisasi Kualitas Butir Tes Ujian Sekolah Menggunakan Teknik <i>Equating</i> dan Program QUEST untuk Menjamin Penilaian Portofolio pada SNMPTN Dadan Rosana dan Sukardiyono.....	145
11. Profil Kompetensi Sosial Mahasiswa Calon Guru Universitas Negeri Yogyakarta Suparman, A. Manap, dan M. Yamin	157
12. Pengembangan Bahan Ajar Sastra Karawitan Melalui Model Eksibisi Seni di SMA Negeri 9 Yogyakarta Suwarna, Sutiyono, dan Afendy Widayat	171

13. Program Pemantapan Penyesuaian Diri dengan Bimbingan Konseling Kelompok <i>Rational Behaviour Therapy</i> (REBT): Model Pendampingan Mahasiswa Baru MM Sri Hastuti dan Juster Donal Sinaga	188
14. Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sistem Robotika Melalui Pendekatan <i>Problem Based Learning</i> Berbantuan Robot Manipulator Dengan <i>Neural Network Backpropagation</i> Nur Kholis, Moh. Khairudin, Haryanto	205
15. Komik Sosiologi: Jembatan untuk Memahami Realitas Sosial Grendi Hendrastomo, Poerwanti Hadi Pratiwi	218
16. Pengembangan Sistem Tes Diagnostik Kesulitan Belajar Kompetensi Dasar Kejuruan Siswa SMK Samsul Hadi, K. Ima Ismara, dan Effendie Tanumihardja	232
17. Pemberdayaan Lingkungan dan Teknologi untuk Mewujudkan Insan yang Unggul Haryadi, Tadkiroatun Musfiroh, Suwardi	241
18. Pengembangan Multimedia Pembelajaran untuk Pendidikan Karakter di SD C. Asri Budiningsih	253
19. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru SMK Program Keahlian Ketenagalistrikan Menggunakan Multimedia Interaktif Berbasis Portal <i>e-learning</i> Soeharto, Sukir, dan Ariadie Chandra Nugraha	277
20. Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 bagi Kepala SD Provinsi Jawa Tengah Slameto	295
21. Pembinaan Karakter Kewargaan Multikultural dalam Program Kurikuler di Madrasah Aliyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta Samsuri dan Marzuki	316
22. Pengukuran <i>Transferable Skills</i> Mahasiswa Berdasarkan <i>QAA for Higher Education</i> Siswandari dan Binti Muchsini	332
23. Studi Tingkat Kesulitan Mahasiswa dalam Menyelesaikan Skripsi Berbasis Penelitian Kualitatif (Studi Kasus Program Studi Pendidikan Seni Rupa FKIP UNS Surakarta) Slamet Subiyantoro dan Endang Widyastuti	350
24. Analisis Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Kualitas <i>E-Learning</i> Muhammad Munir dan Handaru Jati	364
25. Validitas Tes Keterampilan Bermain Futsal Agus Susworo Dwi Marhaendro	373
26. Model Pembelajaran Praktik Pengayaan Motor Listrik Arus Searah Berbantuan Program DELPHI Istanto Wahyu Djatmiko, Sunyoto, dan Deny Budi Hertanto	390
27. Pengembangan Model Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Peningkatan Personal dan <i>Social Skill</i> bagi Anak Jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Aman, Lia Yuliana, dan Ngadirin Setiawan	401

PEMBINAAN KARAKTER KEWARGAAN MULTIKULTURAL DALAM PROGRAM KURIKULER DI MADRASAH ALIYAH SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SAMSURI, MARZUKI

Universitas Negeri Yogyakarta
email: samsuri@uny.ac.id

Abstrak

Makalah ini memiliki dua tujuan utama. *Pertama*, mengidentifikasi sumber-sumber nilai-nilai karakter kewargaan multikultural yang menjadi basis nilai pembinaan karakter kewargaan multikultur di Madrasah Aliyah. *Kedua*, menyajikan model pembinaan karakter kewargaan multikultur dalam program kurikuler berdasar identifikasi kebutuhan di Madrasah Aliyah (MA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian dilakukan melalui (1) analisis dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) guru Pendidikan Kewarganegaraan di MA; (2) observasi; dan, (3) *focus group discussion* (FGD) bersama guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan Madrasah Aliyah Se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengalaman pembinaan karakter kewargaan multikultur di sekolah. Selain itu data penelitian mendasarkan diri kepada dokumentasi praktik pembinaan karakter kewargaan yang telah dikembangkan selama ini.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan karakter kewargaan multikultural dalam program kurikuler di MA tampak dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Kurikulum 2006) serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Kurikulum 2013). Sumber-sumber program kurikuler untuk pembinaan karakter kewargaan multikultural dilakukan dengan pengintegrasian nilai-nilai keislaman sebagai ciri MA dan nilai-nilai kebangsaan sebagaimana dimuat dalam pilar-pilar kebangsaan Indonesia secara eksplisit.

Kata kunci: pendidikan karakter, kewargaan multikultural, kurikulum, madrasah aliyah, Islam

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Bagaimanakah masyarakat kewargaan multikultural Indonesia dibangun melalui program kurikuler di sekolah? Penelitian Samsuri (2009; 2011) menunjukkan bahwa gagasan masyarakat kewargaan di Indonesia telah diperkuat oleh peran negara sejak era reformasi, terutama di era pemerintahan Presiden B. J. Habibie. Pada era Habibie, masyarakat kewargaan diimajinasikan sebagai masyarakat madani. Dalam program kurikuler di sekolah, gagasan masyarakat kewargaan ditransformasikan ke dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan sejak sekolah dasar hingga di tingkat sekolah menengah atas.

Bagaimanakah mengukur keefektifan pembinaan karakter kewargaan multikultur di sekolah? Meminjam rumusan *Character Education Partnership* (2003) yang telah mengembangkan standar mutu pendidikan karakter, sedikitnya ada 11 prinsip yang harus

dipenuhi untuk mengetahui keefektivan program pendidikan karakter. Kesebelas aspek itu ialah sebagai berikut:

1. mempromosikan inti nilai-nilai etis sebagai dasar karakter yang baik (nilai-nilai etis yang pokok dapat berasal dari ajaran agama, kearifan lokal, maupun falsafah bangsa).
2. mengartikan “karakter” secara utuh termasuk pemikiran, perasaan dan perilaku.
3. menggunakan pendekatan yang komprehensif, bertujuan dan proaktif untuk perkembangan karakter.
4. menciptakan suatu kepedulian pada masyarakat kampus/sekolah.
5. memberikan para peserta didik peluang untuk melakukan tindakan moral.
6. memasukkan kurikulum akademik yang bermakna dan menantang dengan menghormati semua peserta didik, mengembangkan kepribadiannya, dan membantu mereka berhasil.
7. mendorong pengembangan motivasi diri peserta didik.
8. melibatkan staf/karyawan kampus (sekolah) sebagai komunitas pembelajaran dan moral yang berbagi tanggungjawab untuk pendidikan karakter serta berupaya untuk mengikuti nilai-nilai inti yang sama yang memandu pendidikan para peserta didik.
9. memupuk kepemimpinan moral dan dukungan jangka-panjang terhadap inisiatif pendidikan karakter.
10. melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter.
11. menilai karakter kampus, fungsi staf kampus (sekolah) sebagai pendidik karakter, dan memperluas kesempatan para peserta didik untuk menampilkan karakter yang baik.

Dari kesebelas indikator pendidikan karakter yang efektif tersebut tampak bahwa, tanggung jawab pendidikan karakter tidak hanya terletak kepada peran sekolah, tetapi juga perlu melibatkan peran orang tua dan masyarakat. Di lingkungan sekolah pun, pendidikan karakter perlu didukung oleh kultur sekolah yang melibatkan segenap elemen utama seperti pimpinan sekolah, guru, karyawan dan iklim berkarakter mulia di antara sesama peserta didik. Dengan demikian sebelas prinsip itu menegaskan bahwa pendidikan karakter itu akan efektif jika: (1) dilakukan secara aktif, (2) untuk individu-individu, dan (3) demi masyarakat yang baik (Hoge, 2000: 104). Dalam hal pendidikan multikultur, maka keefektivannya dapat dilihat dari bagaimana tujuan dan prinsip pendidikan dilakukan untuk agar:

- (1) semua siswa mencapai prestasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya;
- (2) belajar tentang bagaimana belajar dan berpikir secara kritis;
- (3) siswa berperan aktif dalam lingkungan belajar mereka dengan kisah dan pengalaman mereka ke dalam cakupan pembelajarannya;

- (4) menyajikan keragaman gaya belajar;
- (5) mengapresiasi sumbangan kelompok-kelompok berbeda yang berkontribusi sebagai basis pengetahuannya;
- (6) mengembangkan sikap-sikap positif tentang kelompok orang yang berbeda dari mereka sendiri;
- (7) menjadi warga negara yang baik di sekolah, masyarakat dan negara serta dunia;
- (8) belajar bagaimana mengevaluasi pengetahuan dari perbedaan perspektif;
- (9) mengembangkan identitas etnik, nasional dan global;
- (10) memberikan ketrampilan pembuatan keputusan dan analisis berpikir kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan-pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari (Paul Gorski sebagaimana diterjemahkan dari Therik, 2004: 63-64)

Madrasah Aliyah sebagai salah satu jenjang pendidikan menengah atas dengan kekhasan keagamaan Islam merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Keindonesiaan dan keislaman tersaji dengan baik selama ini dalam model pendidikan nasional di Madrasah Aliyah. Data Kementerian Agama (Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2014) sampai dengan tahun 2007/2008 menyebutkan sedikitnya ada 644 MA Negeri (MAN) dan 4.499 MA Swasta (MAS). Dari data itu, MA di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 37 sekolah meliputi 13 MA Negeri dan 24 MA swasta. MA tersebut tersebar di lima kabupaten dan kota, masing-masing sembilan di Kabupaten Bantul, lima di Kabupaten Gunung Kidul, empat di Kabupaten Kulon Progo, 11 di Kabupaten Sleman, dan lima di Kota Yogyakarta (Dinas Pendidikan DIY, 2010). Kenyataan tersebut di satu sisi membuktikan bahwa Indonesia meskipun bukan negara berbasis agama tertentu, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, secara aktual memberikan afirmasi bidang pendidikan Islam bagi mayoritas penduduknya.

Indonesia sebagai negara yang memiliki kemajemukan atas dasar suku, agama, ras dan golongan, pada 2009 mengukuhkan konsepsi “Pilar-pilar Kebangsaan” Indonesia atau lengkap dikenal dengan “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” (Setjen MPR RI, 2012). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia semenjak periode 2009-2014 di bawah Ketua MPR Taufik Kiemas mempertegas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konten keempat pilar tersebut. Meskipun ada perdebatan tentang posisi Pancasila yang menjadi salah satu pilar, karena Pancasila merupakan dasar negara, namun MPR RI bersikukuh menjadikan Pancasila sebagai salah satu dari keempat pilar berbangsa dan bernegara (Samsuri, 2012).

Pilar-pilar tersebut dalam praktiknya oleh MPR disosialisasikan melalui sejumlah

media televisi, surat kabar dan *online*. Selain itu, MPR juga melakukan kegiatan semacam lomba cerdas cermat (LCC) “Empat Pilar. Relevansinya dengan makalah ini, bagaimanakah nilai-nilai karakter kewargaan multikultural dalam konsensus nasional (empat pilar) itu dikembangkan dalam lingkungan MA? Telah menjadi kesadaran publik bahwa MA secara kuantitatif seluruhnya homogen dalam hal identitas keagamaan Islam. Pertanyaan di atas patut diajukan mengingat kekhawatiran sikap dan perilaku eksklusif dan menegaskan keberadaan identitas masyarakat yang berbeda kini terus berkembang dan mengancam integrasi nasional. Untuk itu, makalah ini mengelaborasi kebutuhan pembinaan karakter kewargaan multikultural di MA, terutama di DIY, berdasarkan dokumen pilar-pilar kebangsaan yang dikembangkan oleh MPR. Selain itu, artikel ini mendeskripsikan pengalaman pembinaan karakter kewargaan multikultural di MA selama ini di DIY.

Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dalam makalah ini fokus masalah akan membahas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. *Pertama*, apa sajakah sumber-sumber nilai-nilai karakter kewargaan multikultural yang menjadi basis nilai pembinaan karakter kewargaan multikultur di Madrasah Aliyah? *Kedua*, bagaimanakah model pembinaan karakter kewargaan multikultur dalam program kurikuler di Madrasah Aliyah (MA) di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Tujuan dan Manfaat

Paparan makalah ini hendak mencapai dua tujuan. *Pertama*, mengidentifikasi sumber-sumber nilai-nilai karakter kewargaan multikultural yang menjadi basis nilai pembinaan karakter kewargaan multikultur di Madrasah Aliyah. *Kedua*, menyajikan model pembinaan karakter kewargaan multikultur dalam program kurikuler berdasar identifikasi kebutuhan di Madrasah Aliyah (MA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Manfaat paparan makalah ini secara teoretis memperkaya khazanah model pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keIndonesiaan yang dimuat dalam pilar-pilar kebangsaan. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan dalam pembinaan karakter kewargaan multikultural.

METODE

Sebagai bentuk penelitian pengembangan, makalah ini menyajikan hasil penelitian tahun pertama yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 sekitar enam bulan efektif. Penelitian dilaksanakan di Yogyakarta, meliputi observasi ke MA sampel dan FGD bersama guru-guru PKn dari MA Negeri dan Swasta se-DIY. Dari 37 MA negeri dan

swasta, hanya 21 MA negeri dan swasta yang ikut serta dalam penelitian, karena keterlibatan mereka dalam MGMP PKN MA DIY.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian meliputi para guru Pendidikan Kewarganegaraan Madrasah Aliyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjalankan program kurikuler di sekolah untuk mengimplementasikan pembinaan karakter kewarganegaraan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan. Jumlah guru yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 30 orang dari 21 sekolah.

Instrumen pengumpul data berupa dokumentasi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) semua guru anggota MGMP PKN MA DIY, panduan observasi, serta panduan FGD. Temuan penelitian disajikan dalam bentuk naratif dan deskripsi kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sumber Nilai Karakter Kewarganegaraan Multikultural

Nilai karakter kewarganegaraan multikultural yang dikembangkan di MA DIY bersumber kepada nilai-nilai ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan. Sumber nilai pertama merupakan konsekuensi logis dari keberadaan MA sebagai lembaga pendidikan formal berbasis (kekhasaan) keagamaan Islam. Nilai-nilai kebangsaan yang menjadi dasar pengembangan ini pun merupakan konsekuensi dari konteks kehidupan keberadaan pembentukan MA sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional.

Nilai-nilai ajaran Islam menjadi sumber utama pengembangan nilai karakter siswa. MA sebagai bagian utama satuan pendidikan formal jenjang sekolah menengah atas dengan ciri khas keagamaan Islam dalam sistem pendidikan nasional merupakan produk sejarah dari hubungan antara Islam dan Negara sejak era kemerdekaan Indonesia. Di MA ini selain diajarkan ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan (iman), ibadah dan urusan hidup di dunia dan *ukhrawi* (kehidupan akhirat), juga diajarkan ilmu pengetahuan umum yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kurikulum MA memuat komposisi kajian ke-Islam-an baik sebagai keyakinan maupun sebagai keilmuan, dan kajian kurikuler pengetahuan umum yang diajarkan secara proporsional dalam struktur kurikulumnya. Dalam praktiknya, pengembangan kajian kurikuler di MA berpijak pada dua kaki. *Pertama*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan maka kajian kurikuler selain pendidikan agama Islam, juga diajarkan secara khusus tentang Akidah, Akhlak, ulumul Qur'an, Tafsir Hadith, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. *Kedua*, Kurikulum pendidikan umum di MA mengikuti ketentuan dalam

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Tahun Ajaran 2014/2015, di MA sudah menerapkan Kurikulum 2013 untuk kelas X, sedangkan untuk kelas XI dan XII masih menggunakan Kurikulum 2006.

Kedua macam program kurikuler tersebut menjadikan MA, sebagaimana Madrasah Ibtidaiyah di level sekolah dasar dan Madrasah Tsanawiyah di level sekolah menengah pertama, memiliki tugas ganda. Selain membekali siswa kompetensi ilmu-ilmu keagamaan, MA juga membekali kompetensi ilmu-ilmu umum yang diperlukan sebagai bekal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kondisi MA yang demikian menjadikannya cenderung homogen secara keagamaan, yakni seluruh komponen pendidik, tenaga pendidik dan siswa beragama Islam. Namun, dalam praktik keseharian pemahaman terhadap ajaran agama Islam itu sendiri tidaklah tunggal, bahkan memiliki keanekaan yang bersifat dinamis baik di bawah payung organisasi keagamaan maupun tradisi intelektual Islam.

Nilai-nilai ajaran Islam yang menghubungkan gagasan multikultural dengan kewargaan/kebangsaan antara lain tampak dalam pernyataan Qur'an tentang penciptaan manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, di mana yang membedakannya hanya kepada tingkat ketakwaan seseorang terhadap Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Di sisi lain, ajaran Islam tentang pentingnya hubungan antara sesama manusia dengan segenap keragaman latar belakang dalam aspek kehidupan di dunia adalah bagian utama peran seorang muslim sebagai *khalifatullah fil ardl*. Nilai-nilai ajaran Islam yang sering dikemukakan untuk menghargai perbedaan dan keragaman baik di lingkungan sesama Muslim maupun dengan masyarakat pemeluk agama lainnya terutama tampak dalam hal semangat toleransi beragama, karena prinsipnya "bagimu agamamu, dan bagiku (Islam) agamaku."

Pada bagian lain, nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang dikembangkan guru dalam penelitian ini ialah dokumen MPR tentang "Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". Dokumen memuat kajian arti penting Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen ini menjadi rujukan formal materi pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 oleh para guru PKn/PPKn. Di luar program kurikuler, guru-guru juga terlibat pembimbingan para siswanya dalam perlombaan "Empat Pilar" yang rutin dilaksanakan mulai tingkat Kota/Kabupaten hingga tingkat nasional. Bagi guru-guru MA se-DIY, sebelum Kurikulum 2013 dilaksanakan, sejak kebijakan "Empat Pilar" digulirkan MPR era 2009-2014 telah dikembangkan dalam mata pelajaran PKn di kelas X hingga XII.

Dari identifikasi nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, guru-guru PPKn/PKn MA se-DIY telah menerjemahkan materi-materi kewargaan multikultural sebagaimana dimuat dalam dokumen MPR tersebut sebagai berikut.

Materi Pancasila meliputi nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Untuk materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi topik *Kesetaraan Hak dan Kewajiban setiap Warga Negara, Pengakuan dan Penghormatan setiap orang yang memiliki latar belakang berbeda, dan Kewajiban Negara melindungi setiap individu warga negara yang memiliki latar belakang berbeda*. Perihal Bhinneka Tunggal Ika, membahas tentang kodrati Indonesia memiliki keanekaan namun tetap dalam satu bingkai ke-Indonesia-an. Sedangkan untuk nilai karakter dalam konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain arti penting menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI.

Program Intra Kurikuler Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Kegiatan pembinaan kewargaan multikultural dilaksanakan sesuai pada materi yang terkait dalam pelajaran, dan dilakukan oleh gurunya masing-masing. Materi tersebut muncul secara eksplisit dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Sosiologi. Dan secara implisit pada mata pelajaran lain, misalnya aqidah akhlak, sejarah, penjaskes, dan lain-lain. Pada bagian lain, Pada Tahun Ajaran 2014/2015 di Madrasah Aliyah secara nasional masih berlaku Kurikulum 2006 untuk kelas XI dan XII, sedangkan untuk Kelas X berlaku Kurikulum 2013.

Dalam penelitian ini, pilar-pilar kebangsaan yang menjadi inti karakter kewargaan multikultural di Madrasah Aliyah diajarkan sebagai materi pokok dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Kurikulum 2013. Pilar-pilar kebangsaan dalam Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X dijabarkan dengan mengikuti Kompetensi Dasar dalam Struktur Kurikulum 2013 dan Buku Siswa serta Buku Guru.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas XI dan XII tidak secara eksplisit membagi materi pelajarannya ke dalam empat pilar tersebut. Meskipun demikian guru-guru dalam MGMP PKn DIY mengelaborasi karakter kewargaan multikultur dari pilar-pilar kebangsaan berdasarkan kepada standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kurikulum 2006 untuk kelas XI dan XII.

Pilar-pilar kebangsaan yang menjadi materi pembinaan karakter kewargaan multikultural secara kurikuler di Kelas X dijabarkan mengikuti kompetensi dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seperti dimuat dalam Tabel 1.

Dalam Tabel 1 tampak jelas bahwa komponen materi Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terdiri atas empat materi pokok, yakni Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini sejalan dan mengacu kepada keputusan MPR RI periode 2009-2014 untuk menjadi keempat materi yang disebut dengan “Pilar-pilar Kebangsaan dan Kenegaraan Indonesia.”

Keempat materi pokok itu disebar pencapaiannya ke dalam empat aspek kompetensi inti dan kompetensi dasar, meliputi aspek sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Di Kelas X, aspek penting kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan membahas tentang (1) kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, (2) pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bentuk dan kedaulatan Negara, serta hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (3) sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI, serta kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, (5) indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta kesadaran berbangsa dan bernegara dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia.

Kesadaran multikultural peserta didik sebagai warga negara yang dimuat dari komponen kompetensi dan materi Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut yakni *pertama*, pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya dan gender sebagaimana dikehendaki dari nilai-nilai dasar Pancasila. Selain itu, *kedua*, keanekaan bangsa Indonesia menjadi kekuatan yang mengikat pencapaian tujuan kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. *Ketiga*, integrasi nasional dari sifat keanekaan bangsa dan pembentukan negara serta kesadaran sejarah dan geopolitik Indonesia itu diperlukan dalam menghadapi setiap ancaman nasional terhadap keberadaan NKRI.

Sementara itu, Tabel 2 menampilkan program kurikuler Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI dan XII. Untuk Kelas XI cakupan materi pokok meliputi budaya politik, budaya demokrasi masyarakat madani, keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hubungan internasional dan organisasi internasional, serta sistem hukum dan peradilan internasional. Untuk Kelas XII kajian Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi sikap positif terhadap Pancasila

sebagai ideologi terbuka, berbagai sistem pemerintahan, peranan pers dalam masyarakat demokrasi, dan dampak globalisasi.

Tabel 1. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Madrasah Aliyah (Kurikulum 2013)

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. 1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.3 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta hukum. 2.4 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.5 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. 2.6 Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta	3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3.2 Memahami pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3.3 Memahami bentuk dan kedaulatan Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.4 Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.5 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	<p>dalam lingkup NKRI.</p> <p>3.6 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</p> <p>3.7 Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>3.8 Memahami pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia.</p>
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan	<p>4.1 Menyaji kasus–kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>4.2 Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>4.3 Menyaji hasil telaah bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>4.4 Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.5 Menyaji hasil telaah sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI</p> <p>4.6 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</p> <p>4.7 Menyaji hasil analisis tentang indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>4.8 Menyaji analisis tentang pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia</p> <p>4.9.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender</p> <p>4.9.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional</p>

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 69 Tahun 2013)

Tabel 2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI dan XII Madrasah Aliyah (Kurikulum 2006)

Kelas/ Semester	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
XI/1	1. Menganalisis budaya politik di Indonesia	<p>1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik</p> <p>1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia</p> <p>1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik</p>

		1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan
	2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani	2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi 2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani 2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi 2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
	3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	3.1 Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.2 Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
XI/2	4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional	4.1 Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara 4.2 Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional 4.3 Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik 4.4 Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam meningkatkan hubungan internasional 4.5 Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia
	5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional	5.1 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional 5.2 Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional 5.3 Menghargai putusan Mahkamah Internasional
XII/1	1. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka	1.1 Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka 1.2 Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan 1.3 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
	2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan	2.1 Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara 2.2 Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Indonesia 2.3 Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain
XII/2	3. Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi	3.1 Mendeskripsikan pengertian, fungsi dan peran serta perkembangan pers di Indonesia 3.2 Menganalisis pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia 3.3 Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokratis di Indonesia

	4. Mengevaluasi dampak globalisasi	4.1 Mendeskripsikan proses, aspek, dan dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 4.2 Mengevaluasi pengaruh globalisasi terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia 4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia 4.4 Mempresentasikan tulisan tentang pengaruh globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia
--	------------------------------------	--

(Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006)

Materi pokok di Kelas XI dan XII tidak secara eksplisit pengelompokannya ke dalam empat pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dimaksudkan dalam Kurikulum 2013 pada Kelas X. Namun, apabila dicermati secara rinci dalam materi pokoknya dalam komponen kompetensi dasarnya akan tergambar empat pilar itu. Adapun karakter kewargaan multikultur sangat besar peluangnya dikembangkan dari materi-materi seperti budaya politik dan demokrasi, serta karakter masyarakat madani yang memandang penting sikap rekognisi dan respek terhadap setiap kebhinnekaan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembentukan karakter kewargaan secara tegas disajikan di kelas XI Semester Gasal ketika menyajikan topik Budaya Politik dan Budaya Demokrasi. MA di wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana juga jenjang SMA lainnya, bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, menyelenggarakan Pemilihan Umum OSIS (PEMILOS) untuk memilih pengurus OSIS. Pada saat penelitian berlangsung, baru diadakan persiapan-persiapan Pemilos untuk calon pengurus baru Osis di MA se-Kabupaten Bantul. Kegiatan Pemilos terutama saat pemberian suara meniru proses pemungutan suara pemilu nasional dan pemilu langsung kepala daerah (Pilkada). Pemilos ini selain mengajarkan sistem demokrasi langsung, dan partisipasi siswa dalam OSIS, juga diajarkan nilai-nilai menghormati dan menghargai perbedaan dan keragaman aspirasi setiap siswa.

Program Ko-Kurikuler

Program ko-kurikuler dalam pembinaan karakter kewargaan multikultur dimaknasi sebagai serangkaian aktivitas peserta didik yang berkaitan langsung dengan tujuan kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI dan XII serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Kelas X. Sebagian besar program ko-kurikuler yang teridentifikasi telah dilakukan oleh siswa Kelas XI dan XII, sedangkan untuk Kelas X yang sudah terlaksana ialah berkaitan dengan kegiatan upacara bendera dan kegiatan kerohanian.

Program kurikuler yang telah dijalankan antara lain berupa kewajiban setiap siswa atau kelompok kelas untuk melakukan aktivitas yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan upaya pembinaan karakter kewargaan multikultur. Program tersebut meliputi kegiatan sebagai petugas upacara bendera secara bergiliran; kesempatan menjadi petugas *Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra)*; mengikuti lomba-lomba, misalnya : *Lomba Cerdas Cermat (LCC) "Empat Pilar MPR"*, *LCC Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta*, *Lomba Debat*, *Lomba Peleton Inti (tonti)*; Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain, misalnya *Kemah Kerukunan antar Umat Beragama*, yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, dan lain-lain. Semua program itu ada yang terencana namun ada pula yang dilakukan secara insidental.

Program Ekstra-Kurikuler

Program pembinaan karakter kewargaan multikultur di bidang ekstra kurikuler yang diklaim dilakukan oleh sejumlah MA DIY antara lain kegiatan Pramuka, Tonti, Palang Merah Remaja (PMR), *Civic Club*, *English Club*, *Javanese Club* dan *futsal*. Program-program ekstra-kurikuler tersebut ada yang berkaitan langsung dengan mata pelajaran PKn/PPKn, tapi ada juga yang sama sekali tidak berhubungan langsung. Namun, dalam praktiknya program ekstra-kurikuler diselenggarakan untuk menyalurkan minat dan bakat serta menanamkan semangat kebangsaan (Pramuka), kemampuan pemecahan masalah, dan pelestarian budaya.

Upaya pembinaan karakter kewargaan multikultural di MA yang teridentifikasi di DIY, belum seluruhnya menampakkan keberhasilan. Ada sejumlah kendala berkaitan dengan pemahaman multikulturalis di antara komponen sekolah dan siswa, juga dari masyarakat sekitar itu sendiri.

Salah satu guru menyadari bahwa MA dipandang masyarakat masih bersifat eksklusif pengajarannya, selain karena latarbelakang siswa semua beragama Islam, juga ada pemikiran bahwa MA hanya mengajarkan soal-soal keagamaan belaka. Konsekuensinya, siswa yang tidak beragama Islam tidak mungkin dimasukkan ke MA oleh orangtuanya, tetapi akan dipilhkan sekolah-sekolah umum negeri maupun swasta. Secara internal, MA belum siap memperkenalkan secara utuh keberadaan ajaran-ajaran agama di luar Islam, terutama di perpustakaan, yang tidak mengenalkan kitab agama selain Islam, seperti Taurat, Zabur dan Injil, atau contoh pakaian kebesaran bila pemimpin agama lain memimpin acara keagamaan terutama agama yang diakui di Indonesia.

Pada bagian lain, guru juga menyadari bahwa *stakeholder* sekolah belum sepenuhnya tumbuh kesadaran terhadap urgensi pembinaan karakter itu sebagai tanggungjawab bersama, bukan hanya guru agama, PKn atau BK semata. Selama ini

pembinaan karakter hanya dititikberatkan pada kewajiban guru-guru tertentu, seperti guru agama, PKn atau BK. Kajian tentang pembinaan karakter kewargaan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan di MA barangkali baru kali pertama dilakukan. Untuk itu, bukan hal mudah untuk menilai apakah proses dan hasil pembinaan karakternya sudah berhasil atau sesuai dengan kaidah yang diharapkan ataukah perlu ditindaklanjuti dengan program tindakan/intervensi.

Karakter kewargaan multikultural yang dibangun di sekolah khas keagamaan Islam sulit diidentifikasi karena belum ada standard penilaian atau instrumentasi yang baku untuk menaekannya. Hanya saja, secara empirik pembinaan karakter secara umum di MA berdasarkan kategori keefektifan pendidikan karakter menurut rumusan *Character Education Partnership* (2003), hampir seluruh komponen terpenuhi. Meski demikian, pelibatan *stakeholder* MA untuk dimensi karakter kewargaan multikultural perlu dikaji lebih dalam.

Penekanan kepada program kurikuler Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sesungguhnya meyakinkan banyak pihak bahwa tuntutan pembentukan karakter warga negara yang baik yang toleran dan positif terhadap keragaman, secara langsung diajarkan oleh mata pelajaran ini. Sungguh pun dalam pelajaran Agama diajarkan sikap *tasamuh* (toleran) terhadap orang yang berbeda-beda afiliasi bahkan keyakinan agamanya pun, namun pesan kuat pembinaan karakter kewargaan multikultural diarahkan kepada mata pelajaran PKn/PPKn.

Pilihan terhadap “pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan” sebagaimana dimaksudkan oleh MPR Periode 2009-2014, sebagai *core matter* dan *core values* dari pembinaan karakter kewargaan multikultur merupakan gayung bersambut dengan kebijakan program kurikuler PKn dan PPKn, terutama Kurikulum 2013. Materi pokok PPKn Kurikulum 2013 menjadi bagian penting nilai-nilai utama yang harus dirujuk dalam pembinaan karakter kewargaan multikultur.

Dari hasil observasi dan FGD terhadap guru-guru anggota MGMP PKN DIY, disadari betul bahwa pembinaan karakter kewargaan multikultur di sekolah khas keagamaan Islam seperti MA masih terbatas dan lebih banyak menitikberatkan kepada program kurikuler di kelas. Ini disadari karena tuntutan pembentukan karakter siswa secara umum masih bertumpu kepada mata pelajaran pembentukan kepribadian seperti pendidikan agama dan PPKn/PKn. Dengan demikian keefektifan pembinaan karakter kewargaan multikultur sebagai bagian *grand design* pendidikan karakter di sekolah masih perlu diteruskan kajian mendalamnya dalam penelitian berikutnya.

Pada bagian lain, “kesadaran” tentang eksklusivitas identitas sekolah berbasis kekhasan agama Islam oleh para guru tidak menjadi halangan untuk menanamkan dan menumbuhkan karakter kewargaan multikultural siswa dan elemen sekolah lainnya. Hanya saja, komitmen multikulturalis dari pimpinan sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya, orang tua siswa, masyarakat sekitar dan siswa itu sendiri merupakan modal besar yang harus dihadirkan untuk membangun sikap dan perilaku multikulturalis di sekolah semacam MA.

KESIMPULAN

Dari paparan di muka, maka dalam makalah ini dapat dinyatakan bahwa bahwa program pembinaan karakter kewargaan multikultural dalam program kurikuler di MA tampak ditekankan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Kurikulum 2006) serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Kurikulum 2013). Sumber-sumber program kurikuler untuk pembinaan karakter kewargaan multikultural dilakukan dengan pengintegrasian nilai-nilai keislaman sebagai ciri MA dan nilai-nilai kebangsaan sebagaimana dimuat dalam pilar-pilar kebangsaan Indonesia secara eksplisit.

Pengakuan :

Makalah ini sebagian materinya berasal dari laporan penelitian hibah bersaing (Samsuri dan Marzuki, 2014), yang dibiayai oleh DIPA Universitas Negeri Yogyakarta dengan Surat Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Program Penelitian Desentralisasi BOPTN Skim: Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2014 Nomor: 233a/HB.-BOPTN/UN34.21/2014 Tanggal 17 Maret 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Character Education Partnership. (2003). *Character Education Quality Standards*. Washington: Character Education Partnership
- Dinas Pendidikan Provinsi DIY. (2010). *Data Madrasah Aliyah*.
- Hoge, J.D. (2002). “Character Education, Citizenship Education and Social Studies.” *Social Studies*, Vol. 93 No 3, pp. 103-108
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 69 Tahun 2013. Lampiran I b.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006. Lampiran
- Samsuri dan Marzuki. (2014). *Pembinaan Karakter Kewargaan Multikultural Berbasis Pilar-pilar Kebangsaan di Madrasah Aliyah Se-Daerah Istimewa Yogyakarta*. Laporan Tahunan Penelitian Hibah Bersaing Tahun I. Yogyakarta: LPPM UNY

- Samsuri. (2009). *Transformasi Masyarakat Kewargaan (Civil Society) dalam Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Politik Pendidikan dalam Pembentukan Masyarakat Demokratis)*. Laporan Penelitian Hibah Disertasi Doktor. Bandung: UPI Bandung
- Samsuri. (2011). "Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia." *Cakrawala Pendidikan*. Vol. XXX, No. 2, pp. 267-281.
- Samsuri. (2012). *Pendidikan Karakter Warga Negara*. Surakarta: Pustaka Hanif.
- Setjen MPR RI. (2012) *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Setjen MPR RI
- Therik, T. (2004), "The Notion of Context in Multicultural Education: A Nusa Tenggara Timur Case." Dalam Kamanto Sunarto, *et al. Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping into the Unfamiliar*. Depok: Jurnal Antropologi Indonesia & Yayasan Tifa, pp. 61-72.